



► MASALAH PENGANGGURAN

## Pemkab Gelontorkan Rp2,9 Miliar untuk BLK

SLEMAN—Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Sleman bertambah hingga Rp700 juta. Dengan anggaran ini, Pemkab Sleman mengalokasikan total Rp2,973 miliar untuk menekan angka pengangguran di 2025.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, Erny Maryatun, mengatakan jajarannya terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bumi Sembada. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar pelatihan di UPTD BLK. UPTD ini setiap tahunnya mendapat alokasi anggaran dukungan dalam pengembangan kompetensi peserta. “Dukungan APBD 2024 untuk UPTD BLK 2024 sekitar Rp2,251 miliar. Untuk 2025 bertambah menjadi Rp2,973 miliar,” kata Erny saat ditemui di kantornya, Kamis (2/1).

Sebenarnya UPTD BLK mendapat alokasi Rp3,2 miliar pada 2025. Namun lantaran ada program makan bergizi gratis, maka ada pengurangan alokasi anggaran. Anggaran UPTD tersebut akan digunakan untuk belanja modal alat pelatihan.

Menurutnya Disnaker juga bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja (LPK) swasta dalam mengembangkan kompetensi pencari kerja khusus untuk warga Sleman. Peserta LPK berasal dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kapanewon dan pokok pikiran (pokir) Dewan.

Setelah peserta BLK dan LPK selesai menjalani pelatihan, Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas akan memberikan sosialisasi mengenai pasar tenaga kerja keliling. Disnaker akan membantu peserta pelatihan untuk mengakses lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi pasca pelatihan.

Data peserta akan terunggah di sistem *Siapkerja* Kementerian Tenaga Kerja. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja akan mengakses dan merekrut pekerja melalui sistem ini.

Biasanya, Disnaker akan memberi informasi mengenai lowongan kerja di sektor formal. Sedangkan banyak peserta pelatihan yang memilih untuk bekerja di sektor informal sebagai wiraswasta.

“Seperti perempuan yang kebanyakan mengurus rumah memilih informal. Lulusan BLK yang memilih wiraswasta kami bantu dari sisi modal bekerja sama dengan UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal. Kami beri rekomendasi untuk pinjaman lunak, untuk modal usaha. Kalau mau jadi Pekerja Migran Indonesia juga kami fasilitasi,” katanya.

Lulusan BLK dan LPK yang memilih wiraswasta juga akan dibantu melalui program pendampingan. Erny menyebutnya dengan tenaga kerja mandiri (TKM). TKM akan mendapat bimbingan tenaga kerja swasta (TKS) yang merupakan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Disnaker juga menggelar *mini job fair* bernama *Taxi Pekerja* setiap Kamis Pon. Dalam program ini, Disnaker mengundang dua hingga empat perusahaan untuk merekrut pencari kerja di Mal Pelayanan Publik. (Andreas Yuda Pramono)